



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TA 2025 (*AUDITED*)

KPKNL JAKARTA V

JALAN KKO USMAN DAN HARUN
NO. 10, SENEN, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPKNL Jakarta V adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jakarta V. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 30 April 2026
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Thamrin





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, JAKARTA 10710
TELEPON; (021) 34835146; FAKSIMILE: (021) 34835155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2026

Plt. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Thamrin

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 75.616.289.754,00 atau mencapai 165.15% dari estimasi pendapatan sebesar Rp 45.786.973.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 3.050.154.210,00 atau mencapai 80.82% dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.773.894.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 20.319.103.657,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 19.411.638.916,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 907.464.741,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 19.027.263.940,00 dan Rp 1.291.839.717,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 75.651.691.696,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.447.255.588,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 72.204.436.108,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 25.712.000,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 72.230.148.108,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 1.188.186.911,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 72.230.148.108,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,00 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp72.126.495.302,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 1.291.839.717,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL JAKARTA V LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

Uraian	2025				2024
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	45.786.973.000	75.616.289.754	29.829.316.754	165.15	80.260.654.085
Jumlah Pendapatan	45.786.973.000	75.616.289.754	29.829.316.754	165.15	80.260.654.085
BELANJA					
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang	3.597.814.000	2.970.575.238	(627.238.762)	82.57	
Belanja Modal	176.080.000	79.578.972	(96.501.028)	45.19	
Jumlah Belanja	3.773.894.000	3.050.154.210	(723.739.790)	80.82	4.137.698.046

KPKNL JAKARTA V
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset		
Aset Lancar		
Kas Lainnya dan Setara Kas	19.023.613.940	2.437.280.099
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	168.668.000	107.554.058
Persediaan	219.356.976	349.472.105
Jumlah Aset Lancar	19.411.638.916	2.894.306.262
Aset Tetap		
Peralatan dan Mesin	4.683.892.226	4.620.622.541
Aset Tetap Lainnya	22.852.900	22.852.900
Akumulasi Penyusutan	(3.799.280.385)	(3.912.047.294)
Jumlah Aset Tetap	907.464.741	731.428.147
Aset Lainnya		
Aset Lain-lain	-	130.999.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-	(130.999.000)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
Jumlah Aset	20.319.103.657	3.625.734.409
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang kepada Pihak Ketiga	19.027.263.940	2.437.547.498
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	19.027.263.940	2.437.547.498
Jumlah Kewajiban	19.027.263.940	2.437.547.498
Ekuitas		
Ekuitas	1.291.839.717	1.188.186.911
Jumlah Ekuitas	1.291.839.717	1.188.186.911
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	20.319.103.657	1.188.186.911

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kegiatan Operasional		
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	75.651.691.696	80.255.471.643
Jumlah Pendapatan	75.651.691.696	80.255.471.643
Beban		
Beban Persediaan	224.349.134	219.080.134
Beban Barang dan Jasa	1.670.075.808	1.730.831.174
Beban Pemeliharaan	229.586.508	359.454.292
Beban Perjalanan Dinas	980.328.917	1.743.358.725
Beban Penyusutan dan Amortisasi	342.915.221	290.988.347
Jumlah Beban	3.447.255.588	4.343.712.672
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	72.204.436.108	75.911.758.971
Kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset	25.712.000	62.404.000
Beban Pelepasan Aset	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	25.712.000	62.404.000
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	72.230.148.108	75.974.162.971
Pos Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	-	-
Beban Luar Biasa	-	-
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/(Defisit) LO	72.230.148.108	75.974.162.971

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	1.188.186.911	831.054.979
Surplus/Defisit Lo	72.230.148.108	75.974.162.971
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-
Transaksi Antar Entitas	(72.126.495.302)	(72.617.031.039)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	103.652.806	357.131.932
Ekuitas Akhir	1.291.839.717	1.188.186.911

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta V

Dasar Hukum KPKNL Jakarta V mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di
Entitas dan bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan
Rencana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang
Strategis Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya KPKNL Jakarta V berusaha memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut. DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik. administrasi. dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien. transparan. akuntabel. adil. dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan misi tersebut, dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran strategis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPKNL Jakarta V berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,58%. Pencapaian ini

merupakan hasil sinergi kinerja dari berbagai aspek organisasi yang dirinci sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ IKU	Target	Realisasi	Indeks
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120
1b-CP	Indeks Integritas	100%	105,29%	105,29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	132,66	120
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	112,71%	112,71
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	103,53%	103,53
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	105,63%	105,63
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74%	112,72%	120
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	121,27%	120
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	111,54%	111,54
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,19%	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	111,38%	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	117,76%	120
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120%	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	112,50%	112,50
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	98%	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100%	114,73%	114,73
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80%	110%	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80%	97,61%	120

8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	104,93
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	120%	120

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Jakarta V. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Barang Milik Negara serta Laporan Manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Jakarta V menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Jakarta V dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Jakarta V. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

*Pendapatan–
LRA*

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I diakui setelah disetor ke Kas Umum Negara;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang;
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji diakui setelah terbit SP2D untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji PNS;
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi

ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja KPKNL Jakarta V memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp 3.648.140.000,00. Selama tahun 2025, dilakukan revisi DIPA terkait adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA TA 2025

Uraian	TA 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
Pendapatan:		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	45.786.973.000	45.786.973.000
Jumlah Pendapatan		
Belanja:		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	3.560.100.000	3.597.814.000
Belanja Modal	88.040.000	176.080.000
Jumlah Belanja	3.648.140.000	3.773.894.000

Realisasi

Pendapatan

Rp

75.616.289.754,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 75.616.289.754,00. Pendapatan KPKNL Jakarta V terdiri Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, serta Pendapatan Anggaran lain-lain yang bersumber dari dana mengendap pada rekening bendahara penerimaan yang disetorkan ke kas negara. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	25.712.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.000.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	32.034.153.000	31.951.395.587	99,74
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.415.690.000	2.951.156.720	122,17
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	11.337.130.000	40.681.025.447	358,83
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	6.000.000	-
Jumlah Pendapatan	45.786.973.000	75.616.289.754	165,15

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan 5.79% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	25,712,000	62,404,000	(58.80)
Pendapatan Bea Lelang Kelas I	31,951,395,587	20,713,804,037	54.25
Pendapatan Biaya Adm Pengurusan Piutang Negara	40,681,025,447	56,271,966,343	(27.71)
Pendapatan Jasa Lainnya	1,000,000	2,000,000	(50.00)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,951,156,720	3,210,469,520	(8.08)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0.00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	6,000,000	10,185	58810.16
Jumlah	75,616,289,754	80,260,654,085	(5.79)

Realisasi Belanja

Negara

Rp

3.050.154.210,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp 3.050.154.210,00 atau 80.82 % dari anggaran belanja sebesar Rp 3.773.894.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.597.814.000	2.970.575.238	82,57
Belanja Modal	176.080.000	79.578.972	45,19
Jumlah Beban	3.773.894.000	3.050.154.210	80,82

Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 26,28% dibandingkan dengan TA 2024. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0.00
Belanja Barang	2,970,575,238	3,959,909,346	(24.98)
Belanja Modal	79,578,972	177,788,700	(55.24)
Jumlah	3,050,154,210	4,137,698,046	(26.28)

*Belanja Pegawai
Rp 0*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya kebijakan sentralisasi belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	0.00
Belanja Lembur	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

*Belanja Barang
Rp
2.970.575.238,00*

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah Rp 2.970.575.238,00 dan Rp 3.959.909.346,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24.98% dari

Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,080,841,248	952,696,263	13.45
Belanja Barang Non Operasional	567,934,560	719,348,087	(21.05)
Belanja Jasa	17,650,000	58,849,269	(70.01)
Belanja Pemeliharaan	229,586,508	359,454,292	(36.13)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	980,328,917	1,743,358,725	(43.77)
Belanja Barang Persediaan	94,234,005	126,202,710	(25.33)
Jumlah	2,970,575,238	3,959,909,346	(24.98)

Belanja Modal

Rp 79.578.972,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 79.578.972,00 dan Rp 177.788.700,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 55,24% dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79,578,972	177,788,700	(55.24)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0.00
Jumlah	79,578,972	177,788,700	(55.24)

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp 79.578.972,00, mengalami penurunan sebesar 55,24% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp 177.788.700,00.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Roller Blind	-	162,637,200	(100.00)
AC Split	-	15,151,500	(100.00)
Mesin Fotocopy	43,290,000	-	0.00
LCD Projector	10,239,972	-	0.00
Camera Digital	24,999,000	-	0.00
Tripod	1,050,000	-	0.00
Jumlah	79,578,972	177,788,700	(55.24)

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Pagar Permanen	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp 0*

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp

19.411.638.916,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 19.411.638.916,00 dan Rp 2.894.306.262,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp 0,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp 0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp

19.023.613.940,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 19.023.613.940,00 dan Rp 2.437.280.099,00.

Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP dan kas pada bendahara penerimaan yang merupakan dana pihak ketiga. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19,023,613,940	2,437,280,099
Jumlah	19,023,613,940	2,437,280,099

Adapun untuk rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Rekening Lelang	1,570,149,250	803,525,000
Rekening Piutang	17,359,399,475	1,633,755,099
Rekening Valas	94,065,215	-
Jumlah	19,023,613,940	2,437,280,099

Jumlah saldo rekening valas Per 31 Desember 2025 sebesar US\$5.625,91 kemudian dikonversi ke rupiah dengan kurs JISDOR tanggal 31 Desember 2025 sebesar 1 USD=Rp16.720,00 sehingga diperoleh nilai Rp94.065.215,00.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp 0,00*

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,00*

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp 0,00*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Lancar
Rp 0,00*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di
Muka
Rp 0,00*

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp168.668.000,00*

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 168.668.000,00 dan Rp 107.554.058,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	168,668,000	107,554,058
Jumlah	168,668,000	107,554,058

Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I di atas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta V dan kemudian disetorkan ke kas negara.

Rincian Penyetoran ke Kas Negara

NILAI SETORAN	TANGGAL SETOR	NTPN
67,120,000.00	6 Januari 2026	FD7C661QVM6DT78M
101,548,000.00	7 Januari 2026	04C9C1JNGHAI1RC7
168,668,000.00		-

Persediaan

Rp

219.356.976,00

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 219.356.976,00 dan Rp 349.472.105,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	168,668,000	107,554,058
Jumlah	168,668,000	107,554,058

Aset Tetap

Rp 907.464.741,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 907.464.741,00 dan Rp 731.428.147,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan

dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap KPKNL Jakarta V terdiri dari Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp 0,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Pembelian	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Peralatan dan
Mesin
Rp
4.683.892.226,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 4.683.892.226,00 dan Rp 4.620.622.541,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4,620,622,541
Mutasi tambah:	
- Pembelian	79,578,972
- Transfer Masuk	469,975,700
Mutasi kurang:	
- Penghentian Penggunaan BMN	486,284,987
Saldo per 31 Desember 2025	4,683,892,226
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	3,799,280,385
Saldo per 31 Desember 2025	884,611,841

Gedung dan
Bangunan
Rp 0,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Pembelian	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp 0,00

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp 22.852.900,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 22.852.900,00 dan Rp 22.852.900,00. Aset Tetap tersebut berupa barang perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per 31 Desember 2025.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	22,852,900
Mutasi tambah:	
- Pembelian	-
Mutasi kurang:	
- Penghentian Penggunaan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	22,852,900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	-
Saldo per 31 Desember 2025	22,852,900

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp 0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp 3.799.280.385,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 3.799.280.385,00 dan Rp 3.912.047.294,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Peralatan dan Mesin	4,683,892,226	3,799,280,385	884,611,841
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	22,852,900	-	22,852,900
Jumlah	4,683,892,226	3,799,280,385	884,611,841

Piutang Jangka Panjang
Rp 0,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Tagihan TP/TGR
Rp 0,00

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran
Rp 0,00

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang
Rp 0,00

C.3.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TPA atau TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing

piutang.

Aset Lainnya
Rp 0,00

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp 0,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-lain
Rp. 0,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 130.999.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 0,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 130.999.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp
19.027.263.940,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 19.027.263.940,00 dan Rp 2.437.547.498,00.

Uang Muka dari KPPN
Rp 0,00

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp 19.027.263.940,00

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 19.027.263.940,00 dan Rp 2.437.547.498,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

KETERANGAN	TA 2025	TA 2024
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19,023,613,940	2,437,280,099
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	3,650,000	267,399
Jumlah	19,027,263,940	2,437,547,498

Pendapatan Diterima di Muka
Rp 0,00

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Ekuitas
Rp 1.291.839.717,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.291.839.717,00 dan Rp 1.188.186.911,00. Ekuitas

adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp

75.651.691.696,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 75.651.691.696,00 dan Rp 80.255.471.643,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak:			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,651,691,696	80,255,471,643	(5.74)
Jumlah	75,651,691,696	80,255,471,643	(5.74)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya meliputi pendapatan biad pengurusan piutang negara, pendapatan bea lelang pegadaian, pendapatan bea lelang PL kelas I, pendapatan jasa lainnya dan pendapatan anggaran lain-lain yang transaksinya per 31 Desember 2025.

Dibawah ini dijelaskan perbandingan pendaparan LRA dengan pendapatan LO tahun 2025 sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Pendapatan pada LRA dan LO

URAIAN	SALDO LRA	SALDO LO	SELISIH
Pendapatan Jasa Lainnya	1,000,000	1,000,000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	31,951,395,587	32,012,638,587	(61,243,000.00)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,951,156,720	2,951,156,720	-
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	40,681,025,447	40,681,025,447	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	6,000,000	6,000,000	-
Jumlah	75,590,577,754	75,651,820,754	(61,243,000)

Selisih Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp61.243.000,00, yang berasal dari transaksi sebagai berikut:

1. Pembayaran Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 Rp107.425.000,00;
2. Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.668.000,00.

Beban Pegawai
Rp 0,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	0.00
Beban Uang Makan	-	-	0.00
Belanja Lembur	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Persediaan
Rp 224.349.134,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 224.349.134,00 dan Rp 219.080.134,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	224,349,134	219,080,134	2.41
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	0.00
Jumlah	224,349,134	219,080,134	2.41

Beban Barang dan
Jasa
Rp
1.670.075.808,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.670.075.808,00 dan Rp 1.730.831.174,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	849,183,079	772,309,688	9.95
Beban Jasa Profesi	4,500,000	41,400,000	(89.13)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,339,080	22,812,520	(63.45)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,170,000	107,400,000	23.99
Beban Barang Operasional Lainnya	71,760,000	-	0.00
Beban Bahan	57,761,170	130,772,687	(55.83)
Beban Barang Non operasional Lainnya	510,173,390	588,575,400	(13.32)
Beban Langganan Telepon	-	3,237,324	(100.00)
Beban Sewa	13,150,000	14,212,500	(7.48)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22,039,089	50,111,055	(56.02)
Jumlah	1,670,075,808	1,730,831,174	(3.51)

Dibawah ini dijelaskan perbandingan pendaparan LRA dengan pendapatan LO tahun 2025 sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO

URAIAN	SALDO LRA	SALDO LO	SELISIH
Beban Keperluan Perkantoran	849,183,079	849,183,079	-
Beban Jasa Profesi	4,500,000	4,500,000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,689,080	8,339,080	(3,650,000.00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,170,000	133,170,000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	71,760,000	71,760,000	-
Beban Bahan	57,761,170	57,761,170	-
Beban Barang Non operasional Lainnya	510,173,390	510,173,390	-
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Sewa	13,150,000	13,150,000	-
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22,039,089	22,039,089	-
Jumlah	1,666,425,808	1,670,075,808	(3,650,000)

Selisih Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp3.650.000,00, yang berasal dari transaksi sebagai berikut:

1. Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.650.000,00.

Beban

Pemeliharaan

Rp 229.586.508,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 359.454.292,00 dan Rp 359.454.292,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,586,508	359,454,292	(36.13)
Jumlah	229,586,508	359,454,292	(36.13)

Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada LRA dan LO

URAIAN	SALDO LRA	SALDO LO	SELISIH
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,586,508	229,586,508	-
Jumlah	229,586,508	229,586,508	-

Beban Perjalanan

Dinas

Rp

980.328.917,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 980.328.917,00 dan Rp 1.743.358.725,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	775,468,417	1,272,964,725	(39.08)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	204,860,500	470,394,000	(56.45)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	0.00
Jumlah	980,328,917	1,743,358,725	(43.77)

Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas pada LRA dan LO

URAIAN	SALDO LRA	SALDO LO	SELISIH
Beban Perjalanan Biasa	775,468,417	775,468,417	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	204,860,500	204,860,500	-
Jumlah	775,468,417	775,468,417	-

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0,00*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan.

*Beban Bantuan
Sosial
Rp 0,00*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 342.915.221,00*

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 342.915.221,00 dan Rp 290.988.347,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342,915,221	290,988,347	17.85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Penyusutan	342,915,221	290,988,347	17.85
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah	342,915,221	290,988,347	17.85

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp 0,00*

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Nonoperasional
Rp 25.712.000,00*

D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Nonoperasional per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	25,712,000	62,404,000	(58.80)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Jumlah	25,712,000	62,404,000	(58.80)

Surplus Kegiatan Non Operasional berasal dari Pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain yaitu lelang paket barang inventaris dengan nilai sebesar Rp 14.618.000,00 dan kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp 11.094.000,00.

*Pos Luar Biasa
Rp 0*

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i>	E.1. Ekuitas Awal
<i>Rp</i>	
<i>1.188.186.911,00</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.188.186.911,00 dan Rp 831.054.979,00.
<i>Surplus LO</i>	E.2. Surplus (Defisit) LO
<i>Rp</i>	
<i>72.230.148.108,00</i>	Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 72.230.148.108,00 dan Rp 75.974.033.913,00. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, sampai dengan pos luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar</i>	E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
<i>Rp 0,00</i>	Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
<i>Rp 0,00</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
<i>Rp 0,00</i>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp 0,00*

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Aset Tetap
Nonrevaluasi
Rp 0,00*

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp 0,00*

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp
(72.126.495.302,00)*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (72.126.495.302,00) dan Rp (75.617.031.039,00). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2025

URAIAN	NILAI
Diterima dari Entitas Lain	3,050,154,210.00
Ditagihkan ke Entitas Lain	(75,616,289,754.00)
Transfer Masuk	439,372,843.00
Transfer Keluar	267,399.00
Jumlah	(72,126,495,302.00)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp 3.050.154.210,00 sedangkan DKEL sebesar (Rp 75.616.289.754,00).

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 439.372.843,00, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 267.399.

Ekuitas Akhir

Rp

1.291.839.717,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.291.839.717,00 dan Rp 1.188.057.853,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.01/2007 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan, maka dibentuklah jajaran baru Pejabat Pengelola Keuangan Satker sebagai Berikut:

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Partolo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hari Santosa
PPSPM	: Artho Guntoro
Bendahara Pengeluaran	: Tri Wahyuningsih
Bendahara Penerimaan	: Havivi Natapura

B. Pada tahun 2025 terdapat 1 Program Prioritas Nasional (PN) yaitu Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

URAIAN RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	17,286,000.00	12,043,098.00	276	276

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V 119312

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:45 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	45,786,973,000	75,616,289,754	29,829,316,754	165	51,438,244,000	80,260,654,085	(28,822,410,085)	156
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	45,786,973,000	75,616,289,754	29,829,316,754	165	51,438,244,000	80,260,654,085	(28,822,410,085)	156
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	45,786,973,000	75,616,289,754	29,829,316,754	165	51,438,244,000	80,260,654,085	(28,822,410,085)	156
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,773,894,000	3,050,154,210	(723,739,790)	81	4,333,776,000	4,137,698,046	196,077,954	95
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	3,597,814,000	2,970,575,238	(627,238,762)	83	4,155,775,000	3,959,909,346	195,865,654	95
3. Belanja Modal	176,080,000	79,578,972	(96,501,028)	45	178,001,000	177,788,700	212,300	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V 119312

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:45 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,773,894,000	3,050,154,210	(723,739,790)	81	4,333,776,000	4,137,698,046	196,077,954	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

THAMRIN
196911191996031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 007
SATUAN KERJA : 119312
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 8:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	826,265,000	872,101,000	849,183,079	0	849,183,079	97.37	22,917,921
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51,300,000	49,020,000	22,039,089	0	22,039,089	44.96	26,980,911
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000,000	10,000,000	4,689,080	0	4,689,080	46.89	5,310,920
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,480,000	135,480,000	133,170,000	0	133,170,000	98.29	2,310,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	75,000,000	71,760,000	0	71,760,000	95.68	3,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,033,045,000	1,141,601,000	1,080,841,248	0	1,080,841,248	94.68	60,759,752
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	133,658,000	172,529,000	57,761,170	0	57,761,170	33.48	114,767,830
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	555,087,000	566,640,000	510,173,390	0	510,173,390	90.03	56,466,610
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	688,745,000	739,169,000	567,934,560	0	567,934,560	76.83	171,234,440
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	163,568,000	174,704,000	94,234,005	0	94,234,005	53.94	80,469,995
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	163,568,000	174,704,000	94,234,005	0	94,234,005	53.94	80,469,995
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	30,000,000	30,000,000	13,150,000	0	13,150,000	43.83	16,850,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	30,000,000	34,500,000	17,650,000	0	17,650,000	51.16	16,850,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,860,000	309,930,000	229,586,508	0	229,586,508	74.08	80,343,492
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	300,860,000	309,930,000	229,586,508	0	229,586,508	74.08	80,343,492
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	764,618,000	866,446,000	775,468,417	0	775,468,417	89.5	90,977,583
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	579,264,000	331,464,000	204,860,500	0	204,860,500	61.8	126,603,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,343,882,000	1,197,910,000	980,328,917	0	980,328,917	81.84	217,581,083
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,560,100,000	3,597,814,000	2,970,575,238	0	2,970,575,238	82.57	627,238,762
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,040,000	176,080,000	79,578,972	0	79,578,972	45.19	96,501,028
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	88,040,000	176,080,000	79,578,972	0	79,578,972	45.19	96,501,028
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	88,040,000	176,080,000	79,578,972	0	79,578,972	45.19	96,501,028
	JUMLAH BELANJA	3,648,140,000	3,773,894,000	3,050,154,210	0	3,050,154,210	80.82	723,739,790

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 119312

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 8:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	25,712,000	0	25,712,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	25,712,000	0	25,712,000	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	1,000,000	0	1,000,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	32,034,153,000	31,951,395,587	0	31,951,395,587	99.74
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,415,690,000	2,951,156,720	0	2,951,156,720	122.17
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	11,337,130,000	40,681,025,447	0	40,681,025,447	358.83
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	45,786,973,000	75,583,577,754	0	75,583,577,754	165.08
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	6,000,000	0	6,000,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	45,786,973,000	75,616,289,754	0	75,616,289,754	165.15
	JUMLAH PENDAPATAN	45,786,973,000	75,616,289,754	0	75,616,289,754	165.15

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	19,023,613,940	2,437,280,099	16,586,333,841	680.53
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	168,668,000	107,554,058	61,113,942	56.82
Persediaan	219,356,976	349,472,105	(130,115,129)	(37.23)
JUMLAH ASET LANCAR	19,411,638,916	2,894,306,262	16,517,332,654	570.68
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,683,892,226	4,620,622,541	63,269,685	1.37
Aset Tetap Lainnya	22,852,900	22,852,900	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,799,280,385)	(3,912,047,294)	112,766,909	(2.88)
JUMLAH ASET TETAP	907,464,741	731,428,147	176,036,594	24.07
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	130,999,000	(130,999,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(130,999,000)	130,999,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	20,319,103,657	3,625,734,409	16,693,369,248	460.41
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,027,263,940	2,437,547,498	16,589,716,442	680.59
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19,027,263,940	2,437,547,498	16,589,716,442	680.59
JUMLAH KEWAJIBAN	19,027,263,940	2,437,547,498	16,589,716,442	680.59
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,291,839,717	1,188,186,911	103,652,806	8.72
JUMLAH EKUITAS	1,291,839,717	1,188,186,911	103,652,806	8.72
JUMLAH EKUITAS	1,291,839,717	1,188,186,911	103,652,806	8.72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,319,103,657	3,625,734,409	16,693,369,248	460.41

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

THAMRIN

196911191996031001 196911191996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19,023,613,940	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	168,668,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	219,356,976	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,683,892,226	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	22,852,900	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,799,280,385
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,650,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	19,023,613,940
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,050,154,210
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	75,616,289,754	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	267,399
0.0	313221	Transfer Masuk	0	439,372,843
0.0	391111	Ekuitas	0	1,188,186,911
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	25,712,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	32,012,638,587
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,951,027,662
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	40,681,025,447
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	6,000,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	849,183,079	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22,039,089	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,339,080	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,170,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	71,760,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	57,761,170	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	510,173,390	0
3.0	522141	Beban Sewa	13,150,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,500,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,586,508	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	775,468,417	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	204,860,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342,915,221	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	224,349,134	0
JUMLAH			103,181,929,384	103,181,929,384

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

THAMRIN
196911191996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:46 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,050,154,210
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	75,616,289,754	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	25,712,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,000,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	31,951,395,587
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,951,156,720
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	40,681,025,447
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	6,000,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	849,183,079	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22,039,089	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,689,080	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133,170,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	71,760,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	57,761,170	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	510,173,390	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94,234,005	0
3.0	522141	Belanja Sewa	13,150,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,500,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,586,508	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	775,468,417	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	204,860,500	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79,578,972	0
JUMLAH			78,666,443,964	78,666,443,964

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

THAMRIN
196911191996031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:44 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,651,691,696	80,255,471,643	(4,603,779,947)	(5.736)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	75,651,691,696	80,255,471,643	(4,603,779,947)	(5.736)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	75,651,691,696	80,255,471,643	(4,603,779,947)	(5.736)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	224,349,134	219,080,134	5,269,000	2.405
Beban Barang dan Jasa	1,670,075,808	1,730,831,174	(60,755,366)	(3.51)
Beban Pemeliharaan	229,586,508	359,454,292	(129,867,784)	(36.129)
Beban Perjalanan Dinas	980,328,917	1,743,358,725	(763,029,808)	(43.768)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:44 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	342,915,221	290,988,347	51,926,874	17.845
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,447,255,588	4,343,712,672	(896,457,084)	(20.638)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	72,204,436,108	75,911,758,971	(3,707,322,863)	(4.884)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	25,712,000	62,404,000	(36,692,000)	(58.798)
Pendapatan Pelepasan Aset	25,712,000	62,404,000	(36,692,000)	(58.798)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	25,712,000	62,404,000	(36,692,000)	(58.798)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	72,230,148,108	75,974,162,971	(3,744,014,863)	(4.928)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	72,230,148,108	75,974,162,971	(3,744,014,863)	(4.928)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

THAMRIN
196911191996031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,188,186,911	831,054,979	357,131,932	42.97
SURPLUS/DEFISIT-LO	72,230,148,108	75,974,162,971	(3,744,014,863)	(4.93)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(72,126,495,302)	(75,617,031,039)	3,490,535,737	(4.62)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	103,652,806	357,131,932	(253,479,126)	(70.98)
EKUITAS AKHIR	1,291,839,717	1,188,186,911	103,652,806	8.72

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

THAMRIN

196911191996031001